



**LAPORAN
L K P J
TAHUN 2024**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Laporan ini merupakan wujud pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya dengan semangat *Pro growth, Pro job, Pro Poor* dan *Pro Environment* kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan ini dan semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan.

Kayuagung, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Ir. IRAWAN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651010 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
.....	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	5
1.3 Data Umum Daerah	10
1. Data Geografis Wilayah	10
2. Jumlah Penduduk	10
3. Pertumbuhan Penduduk	11
4. Jumlah PNS.....	11
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	15
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja; dan	15
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	16
BAB II	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	24
2.1 Perubahan Anggara Disnakertrans Kab. OKI.....	24
BAB III	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	30
3.1 Capaian KinerjaProgram dan Kegiatan.....	30
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat;	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	30
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	39
BAB IV	
PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indo
2. nesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Tata Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438).
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4609).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 1999 Nomor 19).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 11).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di dalam tuntutan reformasi yang berkembang saat ini telah mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut menuntut respon yang cepat, tepat dan bijaksana dari jajaran aparatur pemerintah disemua tingkatan dari pusat sampai ke desa/kelurahan. Respon yang demikian hanya mungkin apabila jajaran aparatur menyadari bahwa paradigma sudah berubah dan karenanya diperlukan berbagai perubahan dan karenanya diperlukan berbagai perubahan dan penyesuaian termasuk perubahan pola pikir dan pola tindakan yang cepat tanggap dan visioner.

Di dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, sebagai bagian dari pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentulah harus dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi itu. Pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah dapat mengakomodir paradigma baru yang berkembang dengan segala spirit yang terkandung di dalamnya.

Berangkat dari kondisi faktual saat ini, dengan semua potensi, peluang tantangan serta isu dan permasalahan yang masih dihadapi, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dirumuskan visinya sebagai berikut;

Visi :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG LEBIH MAJU,
MANDIRI, SEJAHTERA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”***

Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Komitmen Bupati Ogan Komering Ilir yaitu “*Semangat membangun dan melayani dari Desa menuju OKI Mandira*”.

Misi :

Untuk dapat mewujudkan visi di atas akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- e. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan.
- f. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan misi ke dua dan ke empat pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelatihan keterampilan dengan memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada.

3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan,
4. Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja,
5. Peningkatan pelayanan informasi pasar kerja,
6. Penguatan peran penyelesaian Hubungan Industrial,
7. Meningkatkan kualitas pembangunan permukiman transmigrasi dan kualitas sumberdaya manusia,
8. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,
9. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan pedesaan.

B. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan melalui :

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana Balai Tenaga Kerja (BLK).
- Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan berdasarkan potensi yang ada.
- Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja.
- Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan informasi pasar kerja.

- Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan Hubungan Industrial.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam pedesaan.
- Fasilitasi perpindahan dan penempatan calon transmigran.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja.
- Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran.
- Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.
- Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi.
- Peningkatan kapasitas sumber daya transmigran dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal.
- Penguatan lembaga sosial kemasyarakatan.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual.
- Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan.
- Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan badan usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi.
- Peningkatan sarana dan prasarana kawasan dan antar kawasan transmigrasi.
- Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- Meningkatkan pembinaan disiplin dan kinerja aparatur melalui *reward* dan *fanismen*.

C. Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan dalam mengentaskan kemiskinan dari pedesaan dengan cara mengurangi pengangguran, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai dan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi.

1.3 Data Umum Daerah

Gambaran umum daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat di gambarkan pada data informasi profil daerah secara umum yang meliputi ;

1. Data Geografis dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di antara $104^{\circ}, 20'$ dan $106^{\circ}, 00'$ Bujur Timur dan $40,30^{\circ}$ sampai $40,15^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut. Secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara; Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan ilir dan Kota Palembang.
- Sebelah Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Propinsi Lampung.
- Sebelah Barat; Kabupaten Ogan Ilir dan
- Sebelah Timur Selat Bangka dan laut Jawa.

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar $19.023,47 \text{ Km}^2$ dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per Km^2 . Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan. Wialayah

paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan (4.853,40 Km²) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Kota Kayuagung (145,45 Km²).

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan kepadatan jumlah penduduk perkotaan dalam hal ini adalah Kota Kayuagung sebagai Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan tahun 2014 sebanyak 41.131 sedangkan pada tahun 2022 dengan proyeksi penduduk 1,49 % sebanyak 62.223 jiwa.

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan erat dari sektor sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan penyediaan sarana kesehatan adalah sebagai kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena sektor ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup signifikan.

Sektor pertanian juga masih menopang kehidupan rakyat di desa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Kayuagung menanam padi. Tanaman lain yang diusahakan petani disini yaitu cabai dan kacang panjang. Selain padi dan hortikultura, tanaman karet sekarang telah menjadi primadona yang banyak ditanam oleh masyarakat. Dibeberapa desa juga ditanam kelapa sawit baik oleh perusahaan swasta maupun oleh perorangan. Restoran merupakan salah satu penunjang dalam industri pariwisata di Kecamatan Kayuagung.

Industri merupakan pembangunan pada hakikatnya salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu, berdaya saing di pasaran dan menunjang pembangunan di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten OKI.

4. Jumlah PNS

Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sampai dengan bulan 01 Januari 2024 berjumlah 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 43 orang Tenaga Sukarela (TKS).

Tabel 1 :

Pegawai Disnakertrans Kab OKI Tahun 2023	
PNS	TKS
30	43
Total	73

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Pangkat/golongan dan eselon, Jabatan Struktural, Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2 :

Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan di Disnakertrans

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

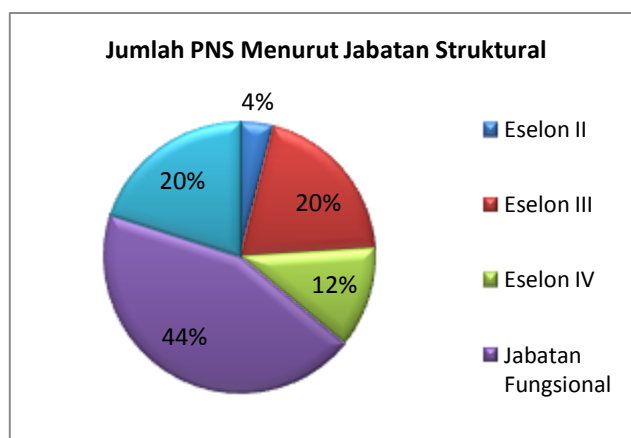
Golongan	A	B	c	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	1	-	3	9	-
IV	7	1	1	-	
IX	3				
VII	2				
Total					30

Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan di Disnakertrans 2022	
Golongan I	0
Golongan II	0
Golongan III	13
Golongan IV	9
Golongan IX	3
Golongan VII	2

To resize chart data range, drag lower right corner of range.

Tabel 3 :
Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural di Disnakertrans
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

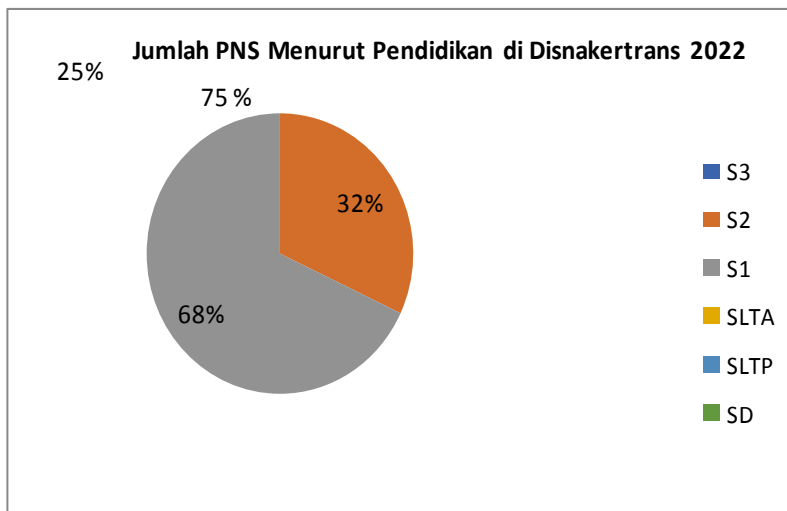
No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	4
4	Jabatan Fungsional	15
5	Staf	4
Total		30



Tabel 4 :
Jumlah PNS menurut Pendidikan di Disnakertrans
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	8
3	S1/D IV	20

4	D III	2
5	D I	-
6	SLTA	-
7	SLTP	-
8	SD	-
Total		30



Tabel 5 :

Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

No Urut	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	1	5

4	SUB Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional	5	10	15
5	Kepala Sub Bagian	-	3	3
6	Kepala UPTD (Plt)	1	-	1
7	Staf	2	2	4
Jumlah		14	16	30

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 sudah menjalankan program dan kegiatannya untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dengan mendapatkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) melalui tugas Pembantuan.

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah di dalam pembiayaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Operasi) yang dianggarkan sebesar : **Rp. 4.000.206.182** namun hanya terealisasi sebesar **88,40%** yaitu **Rp. 4.291.666.588**
2. Belanja Langsung (Belanja Modal) yang dianggarkan : **Rp.3.948.720.995** dengan realisasi sebesar **91,34%** yaitu **Rp. 4.320.166.588**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai	4.000.206.182	4.291.666.588	88,40
2.	Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	3.460.438.270,00 2.409.715.500	3.167.409.767,00 2.015.335.780,00	91,53 83,63

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja 750 Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat Satu Program kegiatan yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah **Rp57.140.500,-** dengan realisasi **100%**.

Capaian output kegiatan ini adalah Laporan dan Dokumen.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah **Rp.3.948.720.995-** dengan realisasi **91,58%**.

Capaian output kegiatan ini adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini **Rp.,-** dengan realisasi atau **0%**. Capaian output kegiatan ini adalah Pendidikan dan pelatihan Pegawai.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah **Rp. 133.218.200,-** dengan realisasi atau **98,97%**. Capaian output kegiatan ini adalah kelengkapan administrasi kantor

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah **Rp, -** dengan realisasi atau **0%**. Capaian output kegiatan ini adalah Mebel, kendaraan dinas dan peralatan dan mesin lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah **Rp.424.672.255**, dengan realisasi atau **89.25%**. Capaian output kegiatan ini adalah Jasa surat menyurat, belanja pegawai dan jasa pendukung lainnya.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.116.34.422,-** dengan realisasi atau **81,41%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, peralatan gedung kantor dan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pada program ini terdapat dua kegiatan yaitu :

1) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.427.682.000,-** dengan realisasi atau **99,92%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang siap pakai, tersedianya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker dan tercipta tenaga kerja yang terampil dan berwirausahaan.

2). Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.84.302.039,-** dengan realisasi atau **96,15%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah tersedianya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pada program ini terdapat empat kegiatan yaitu

1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.** dengan realisasi atau **%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah terpenuhinya pencari kerja yang disalurkan.

2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.5.000.000,-** dengan realisasi atau **100%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah terpenuhinya pengawasan dan pengendalian LPTKS.

3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.-** dengan realisasi atau **%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah tersedianya layanan informasi bursa tenaga kerja yang cepat.

4) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.35.000.000,-** dengan realisasi atau **100%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah peningkatan SDM/wawasan calon PMI.

5) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.,-** dengan realisasi atau **%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah tersedianya data TKA yang membayar pajak redistribusi/perpanjangan IMTA.

4. Program Hubungan Industrial

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.20.000.000,-** dengan realisasi atau **100%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah terdatanya BPJS Ketenagakerjaan.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.40.000.000,-** dengan realisasi atau **100%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelembagaan dan persyaratan kerja dan terfasilitasinya penyelesaian perselisihan hubungan Industrial antara perusahaan dan pekerja.

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp.20.000.000,-**

dengan realisasi atau **100,00%**. Capaian output pada kegiatan ini adalah Terbentuknya kawasan transmigrasi baru

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu :

Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahab Kemandiriaan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp146.100.000,-**

dengan realisasi atau **97,40%**. Capaian output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kewirausahaan dan pelatihan usaha mandiri bersama pembinaan pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi trans, pembinaan peluang investasi dan bisnis daerah Transmigrasi, terbinya usaha ekonomi dan sosial budaya Transmigrasi dan pembinaan pengembangan pemerintahan masyarakat Transmigrasi.

Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan Anggaran Disnakertrans Kab OKI

Pada tabel di bawah ini merupakan perubahan terhadap anggaran pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir;

NO	Program Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	57.000.000	57.000.000	57.000.000
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.32.166.588	3.948.720.995	3.948.720.995
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.720.200	133.218.200	133.218.200
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	431.468.800	424.672.255	424.672.255
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	137.556.000	116.661.828	20.853.578
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	1) Pelaksanaan	428.022.000	427.682.000	427.682.000

	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	87.000.000	84.302.039	3.377.961
	Program Penempatan Tenaga Kerja 1) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	35.000.000

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat;

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;

No	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Disnakertrans Kab. OKI		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	

			4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	28 Orang	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 Orang	4 Orang	Anggaran di Kembalikan Kas negara	Anggaran di Kembalikan Kas negara	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1040 Paket	1040 Paket	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	

			3. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	5 Paket	Paket	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undang	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45 Laporan	45 Laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah								
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	

				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	40 Unit	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
				3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah	
	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Disnakertrans Kab. OKI	Tersedia Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja (BKK).	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
			Tersedia Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					
				1. Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasar klister kompetensi.	192 Orang	192 Orang	Honor PNS tidak bisa dibayarkan. - Uang konsumsi tidak bisa dcaikan karena pembukaan langsung pelatihan	Honor PNS Tidak lagi diambil dan dibutuhkan perencanaan yang lebih matang kedepan	

				2. Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja .	4 Lembaga	4 Lembaga	Honor PNS tidak bisa dibayarkan. - Penambahan target karena adanya dana tambahan DID (Dana Inflansi Daerah) Tahun 2023 sehingga menambah pelatihan di lembaga yang mengakibatkan bertambahnya target menjadi 12 Lembaga namun 1 Lembaga tidak terlaksana dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan pelatihan pada kecamatan dan terlaksana total 14 Lembaga.	Honor PNS Tidak lagi diambil dan dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang lebih matang kedepan.	
			Terpenu	Pembinaan Lembaga Pelatihan					

			hinya Lembag a Pelatiha n Kerja Swasta yang berstan dar	Kerja Swasta.					
				1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	16 Lembaga	16 Lembaga	Honor PNS tidak bisa dibayarkan.	Honor PNS Tidak lagi diambil dan dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang lebih matang ke depan.	
3	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Disnakertrans Kab. OKI	Tepenu hinya pelayan an antar kerja Magang Ke Jepang	Program Penempatan Tenaga Kerja					
				Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					
				1. Pelayanan antar Kerja	50 Orang	50 Orang	Adanya seleksi peserta Magang ke Jepang		
		Disnakertrans Kab.OKI	Terpenu hinya Pencari Yang Disalurk an	PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA					
						Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak ada masalah
				PENGELOLAAN INFOMASI PASAR KERJA					
		Disnakertrans Kab.OKI							

		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (satu) Daerah Kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang	Tidak ada masalah	Tidak ada Masalah
		Meningkatnya Kesempatan Kerja					
			Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi IMTA)	50 Orang	50 Orang	Tersedianya data TKA yang membayar Pajak Restribusi Perpanjangan IMTA sebanyak 30 orang, meskipun dalam penyelesaian Perda penyesuaian dan UU HKPD maka pembayaran Restribusi untuk sementara dialihkan di pusat dan didapat sebanyak 30 orang TKA yang lokasi kerja dalam satu Kabupaten OKI.	Percepatan penyusunan Raperda penyesuaian RPTKA ke dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022
4	Disnakertrans Kab. OKI	Meningkatnya Kualitas Hubungan	Program Hubungan Industrial				

			Industria I						
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sarana untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
				Penyelenggaraan pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.					
				1. Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berkaitan/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	6 Perkara	6 Perkara	Pelaksanaan sosialisasi 2x terlaksana hanya 1x dilaksanakan dikarenakan keadaan Covid-19	Dikembalikan kembali ke KAS Daerah	

	Terfasilitasnya pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja			2. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan berkaitan/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	10 Perkara	10 Perkara	Belanja jasa tenaga keamanan hari buruh (Mayday)	Dikembalikan kembali ke KAS Daerah		
				3. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1310 Orang	1310 orang	Tersedianya keselamatan kerja	Dikembalikan kembali ke KAS Daerah		
5	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Disnakertrans Kab. OKI	Meningkatnya Kawasan transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak usaha	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari I (satu) Daerah Kabupaten/Kota.						
				Penyiapan lingkungan hunian fisik, social, ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Perjalanan Dinas Biasa	Perencanaannya Kegiatan yang lebih matang		

6		Disnakertrans Kab. OKI	Kawasa n yang layak huni, layak usaha dan layak berkem bang	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					
				Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahab Kemandirian					
				1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	Masih kurang fasilitas listrik	Sudah dilakukan pendataan dari Kementerian terkait permasalahan listrik untuk lokasi transmigrasi	

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

BAB IV
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD dititikberatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui urusan urusan wajib Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. OKI. Penjabaran secara konkrit dari Renstra Strategis dan Realisasi Pengelolaan Anggaran berupa Pendapatan maupun Belanja yang telah dilaksanakan tersebut tentunya berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan rumusan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ilir ***"Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. OKI Tahun 2024.

Kayuagung, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Ir. IRAWAN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651010 199312 1 001

